



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ERNESTO MARINGAN SILITONGA**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN FT**
3. NHK : **877074**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.550.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 753 m2/347 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , Rp. 990.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , Rp. 1.700.000.000
3. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , Rp. 610.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 259 m2/498 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 325.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 69.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI ER6 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 44.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 15.900.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 70.228.603**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 7.961.128.603

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.961.128.603

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.